



## Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah

**Ali Topan**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:Alitopan21@mhs.uinjkt.ac.id)

**Itaanis Tianah**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

[ita@iainmadura.ac.id](mailto:ita@iainmadura.ac.id)

### **Abstract**

*This study explores the role of local Kiai of Madura in the politics of the reform era, examining their contribution to practical political contestation and its impact on the Muslim-majority Madura community. Kiai, who was respected and had great influence, exercised the role of religious figure and public official. The local Kiai here refers to Kiai who are directly involved in the world of practical politics. The purpose of this study is to analyze the contribution of Kiai in Madura politics and its impact on the policy and application of the teachings of Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. This research is a literature review using the historical method with four steps. First heuristic (collection of sources), primary and secondary sources used in the form of books, scientific articles, proceedings, the results of the data on votes obtained from the KPU and the writings that are relevant to this research obtained from the National Library of Indonesia, UIN Jakarta Library, Google Scholar, Sinta and observations in the field. Second, source criticism. Third, interpretation and finally historiography. As an analytical knife, the research uses the hegemonic theory of Gramsci. The findings show that Kiai plays an important role in legal and policy politics, fighting for people's rights and grounding religious teachings. This research provides insight into the integration of religious teachings with public interest in the context of reform.*

**Keywords:** Local kiai, Politics, Madura.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi peran Kiai lokal Madura dalam politik era reformasi, mengkaji kontribusi mereka dalam kontestasi politik praktis dan dampaknya terhadap masyarakat Madura yang mayoritas Muslim. Kiai, yang dihormati dan memiliki pengaruh besar, menjalankan peran sebagai tokoh agama dan pejabat publik. Dimaksud Kiai lokal disini merujuk terhadap Kiai yang terlibat langsung pada dunia politik praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Kiai dalam politik Madura serta dampaknya pada kebijakan dan penerapan ajaran *Ahlu Sunnah Wal-Jamaah*. Penelitian ini merupakan kajian pustaka menggunakan metode sejarah dengan empat langkah. Pertama heuristik (pengumpulan sumber), sumber primer dan sekunder yang digunakan berupa buku, artikel ilmiah, prosiding, hasil data perolehan suara dari KPU dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan UIN Jakarta, Google Scholar, Sinta dan pengamatan di lapangan. Kedua kritik sumber. Ketiga interpretasi dan terakhir historiografi. Sebagai pisau analisis, penelitian menggunakan teori hegemoni dari Gramsci. Temuan menunjukkan bahwa Kiai berperan penting dalam politik hukum dan kebijakan, memperjuangkan hak-hak masyarakat dan membumikan ajaran agama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang integrasi ajaran agama dengan kepentingan publik dalam konteks reformasi.

**Kata kunci:** Kiai lokal, Politik, Madura.

## **Pendahuluan**

Perjalanan sejarah kelompok Kiai dalam tatanan perjuangan dan pemikiran tidak lepas kaitannya dengan sejarah, bisa dilacak pada perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, aktor semangat perjuangan memberontak terhadap kebijakan kolonialisme barat adalah tokoh agama, Kiai, Ulama, guru ngaji, dan orang-orang yang memiliki gelar Haji.<sup>1</sup> Di bawah kekuasaan kolonial Belanda, para tokoh berupaya mendirikan komunitas keagamaan dengan tujuan untuk memajukan kecerdasan bangsa memperjuangkan kemerdekaan.<sup>2</sup> Pada Orde Lama, Kiai dan politik tidak bisa dipisahkan, organisasi keislaman atau *jami'iyah diniyah* Nahdlatul Ulama (NU) pernah menjadi partai politik, organisasi keislaman didirikan oleh ulama terpengaruh (KH Hasyim Asy'ari). Pertama kali pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada tahun 1955 dengan sistem multipartai diikuti 172 peserta partai politik, salah-satunya Nahdlatul Ulama, hasilnya sangat memuaskan.<sup>3</sup> Beralih pada Orde Baru, dikenal dengan otoriter, pengekan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi dan penerapan sistem sentralisasi. Masyarakat termasuk tokoh agama (Kiai) dibatasi tidak bisa leluasa berpartisipasi dalam kancah politik praktis.<sup>4</sup>

Pasca runtuhnya Orde Baru 1998 dan masuk era reformasi, terjadi peningkatan kebebasan berpendapat serta dinamika politik di Indonesia, tidak lagi menggunakan format *executive heavy* dan *legislative heavy* seperti era sebelumnya. Era reformasi, membuka pintu ketertutupan demokrasi. Sebagai respons demokrasi, banyak partai politik didirikan, pemilihan 1999 sebanyak 48 partai, 2004 sebanyak 24 partai, 2009 sekitar 22 partai yang lolos verifikasi, 2014 sebanyak 46 yang lolos verifikasi faktual, namun 12 partai politik yang bisa ikut pemilu, 2019 sebanyak 14 partai politik ikut pemilu, dan 2024 18 partai politik serta 6 partai lokal Aceh ikut kontestasi politik.<sup>5</sup> Keterbukaan demokrasi ini memicu ketertarikan masyarakat berpartisipasi untuk persentuhan langsung dengan politik praktis, termasuk tokoh agama (Kiai). Kiai sebagai kaum elite lokal mendapat tempat dalam tatanan sosial politik masyarakat Madura, kemampuan ilmu agama yang mumpuni serta kepercayaan masyarakat pada Kiai memiliki modal primer mempengaruhi konstituen serta dimanfaatkan

---

<sup>1</sup> Ali Maschan Moesa, "Agama dan Politik : Studi Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme Pasca Orde Baru. Disertasi, Universitas Airlangga" (Universitas Airlangga Surabaya, 2006), <https://repository.unair.ac.id/32568/>.

<sup>2</sup> Miaz: Yalvena, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (UNP Press, 2012), 63.

<sup>3</sup> "NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955," NU Online, 2019, <https://www.nu.or.id/fragmen/nu-dan-pemilu-pertama-di-indonesia-tahun-1955-Hf6jW>.

<sup>4</sup> Asmaul Fauziyah, "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989" (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019), 38.

<sup>5</sup> Ali Topan and A Hakim, "The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation in Post-New Order Madura 1998-2019," *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and ...* 1, No. 1 (2023): 21–39, <https://ojs.nupalengaan.or.id/NahNU/article/view/22%0Ahttps://ojs.nupalengaan.or.id/NAHNU/article/download/22/2>.

untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, mulai dari level bawah sampai level atas.<sup>6</sup> Gelar Kiai yang menempel pada dirinya menentukan terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat untuk mendapat perlakuan istimewa secara hierarkis. Hierarki terbentuk tidak melalui mekanisme formal, melainkan terbentuk adanya pengakuan dari masyarakat, bahwa Kiai memiliki ilmu agama mumpuni, pengaruh nasab dan memiliki lembaga pendidikan Islam.<sup>7</sup>

Dalam konteks masyarakat Madura, Kiai merupakan unsur esensial.<sup>8</sup> Keterlibatan Kiai dalam kontestasi politik menjadi pembahasan menarik dan penting. Menarik, karena Kiai bagi masyarakat Madura merupakan tokoh kharisma, wibawa, disegani dan dipercaya sebagai pemberi petunjuk, masukan, kritik, dan saran, baik dalam aspek budaya, ekonomi, keagamaan, maupun dalam hal yang tabu (politik). Selain itu, Kiai tidak hanya dilihat dari sudut pandang tunggal, melainkan Kiai dilihat dari berbagai perspektif yang lebih kompleks, terutama keterlibatan dalam pusaran politik.<sup>9</sup> Dianggap penting, disebabkan penghormatan masyarakat Madura terhadap Kiai begitu tinggi dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura.<sup>10</sup>

Maka dari itu, keterlibatan Kiai pada kontestasi politik tidak lain sebagai *checks and balances* penyeimbang antara kepentingan umat dan agama dengan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, Kiai dilihat dari optik sebagai pemimpin umat dan pemimpin lembaga pendidikan Islam (Pesantren), serta sebagai *elite* politik lokal. Unsur tersebut, Kiai pemimpin umat dan aktor politik mempengaruhi terhadap stabilitas perpolitikan di Madura, baik pemilihan Kepala Desa, Pilbup, Pilgub, bahkan Pilpres.

Tiga variabel di atas, kajian Kiai menjadi populer dikalangan peneliti dan akademisi. Zainuddin Syarif (2016), telah melakukan penelitian dengan judul "*Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura*". Temuan dari Syarif, politik yang digunakan Kiai untuk mempertahankan wibawa kepemimpinannya menggunakan cara kekuatan dominasi tradisional dan karismatik. Dua cara ini disalurkan melalui simbol-simbol ketaatan yang dikemas dengan nilai agama.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Kana Lailatul Ahadiyah, "Relasi Sosial Antara Kyai non Politik dan Kyai Politik di Komunitas Religius Pedesaan," 2018, 1–21.

<sup>7</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia," *Jurnal Islamic Review* 3, no. 1 (2014): 1–32.

<sup>8</sup> M. Dhuha Aniqul Wafa, "Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009," *Journal of Indonesian History* 1, no. 1 (2012): 63–70, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/2227>.

<sup>9</sup> R Subiyakto, "Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2011): 41–50, [http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last\\_47\\_56.pdf](http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_47_56.pdf).

<sup>10</sup> Sukron Romadhon, "Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon," *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 2020, 35–42.

<sup>11</sup> Zainuddin Syarif, "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura," *Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 293–311, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abd A'la & DKK (2018) dengan judul “*Islam dan Agamaisasi Politik: Studi Analisis Terhadap Peran dan Pergerakan Forum Kiai Muda (FKM) Pamekasan Madura*”. Salah-satu temuan dari A'la adalah keterlibatan FKM (Forum Kiai Muda) dalam kontestasi politik, tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan membangun hubungan bersama elit partai politik di daerah <sup>12</sup>.

Meski penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada kesamaan dari segi objek penelitian, yaitu politik dan Kiai. Namun penelitian ini ada *novelty* dari aspek partisipasi Kiai secara universal, tidak hanya menyoroti politik tingkat lokal, tetapi dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan tingkat pusat sekalipun. Tidak hanya itu, penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Gramsci. Sedangkan peneliti terdahulu hanya menyoroti politik Kiai tingkat lokal Kabupaten saja. Atas dasar itulah, tujuan penelitian ini fokus apa kontribusi Kiai dalam percaturan politik di Madura.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan menggunakan metode sejarah. Adapun langkah-langkah metode sejarah. *Pertama*, heuristik (pengumpulan sumber), sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan lapangan, penelusuran dari data KPU, perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan daerah kabupaten Pamekasan, dan diperoleh dari buku, artikel ilmiah, prosiding, Google Scholar dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. *Kedua*, kritik sumber, langkah kritik sumber dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan. *Ketiga*, interpretasi, setelah melalui kritik sumber, lalu data di analisis, ditafsirkan dan diuraikan. *Keempat*, historiografi, penulisan data sesuai dengan topik yang diteliti dan tidak lepas dari ruang lingkup sejarah.<sup>13</sup>

Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori hegemoni dari Gramsci. Menurut pandangan Gramsci, hegemoni adalah ketertundukan sebuah konsensus diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni.<sup>14</sup> Dalam konsep hegemoni, para kaum elite atau intelektual memiliki peran penting terhadap wilayah produksi. Pada awalnya konsep hegemoni mempresentasikan sebuah kelas yang menjalankan kekuasaan terhadap kelas ter subordinasi dengan *coercion* (kekerasan) dan *persuasion* (persuasif). Namun sekarang hegemoni tidak lagi menggunakan dominasi dengan cara kekerasan, melainkan lewat cara persetujuan, suatu cara kepemimpinan ideologis,

---

<sup>12</sup> Abd A'la and DKK, “Islam dan Agamaisasi Politik: Studi Analisis Terhadap Peran dan Pergerakan Forum Kiai Muda (FKM) Pamekasan Madura,” *Jurnal Review Politik* 8, No. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jrp.2018.8.1.%25p>.

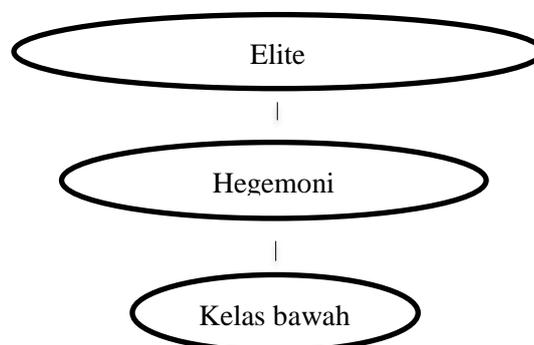
<sup>13</sup> M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 219-230.

<sup>14</sup> Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci,” *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, No. 1 (2018): 11–33, <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.

politik dan mengedepankan mengorganisir atas dasar kesepakatan bersama.<sup>15</sup> Teori hegemoni meliputi transformasi budaya sebagai fondasi kebudayaan baru tanpa melakukan kekerasan dan pemaksaan melalui jalur kepemimpinan intelektual dan moral. Kebudayaan merupakan hal yang penting dalam konsep teori hegemoni. Pandangan kebudayaan yang digunakan Gramsci berawal dari pandangan kebudayaan De Sanctis, yang mana kebudayaan sebagai panduan hidup manusia yang menggerakkan gaya hidup dan etika yang berasal dari agama.<sup>16</sup>

Gramsci memperkenalkan hegemoni dengan berbagai pengertian, akan tetapi beragam pengertian dapat dijumpai dua unsur penting. Pertama, penguasa dan kekuasaan, memerintah dan yang diperintah. Dalam masyarakat tidak lepas dari orang yang memerintah dan yang diperintah, selalu ada penguasa dan kekuasaan. Kedua, konsensus (kesepakatan), hegemoni diperoleh melalui mekanisme kesepakatan bukan dari mekanisme kekerasan atau penindasan kelas lain, praktiknya harus melalui berbagai cara, salah-satunya dengan lembaga atau institusi.<sup>17</sup>

Teori Gramsci dapat dikontekstualisasikan dengan penelitian ini untuk menggambarkan masyarakat madura yang patuh pada simbol-simbol agama (elite loka/Kyai) dalam segala aspek, agama, budaya, kekuasaan maupun aspek politik. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai kerangka berpikir, bisa dilihat di bawah ini:



Menurut teori Gramsci, kekuasaan terbentuk salah-satunya dengan adanya unsur agama.<sup>18</sup> Agama dijadikan unsur penting kekuasaan supaya kekuasaan bisa diperoleh. Kebanyakan orang beranggapan bahwa dengan adanya keterkaitan agama, maka secara otomatis kekuasaan akan terbentuk dengan sendirinya. Kekuasaan ini akan didapatkan oleh pemuka agama, dalam konteks Madura, tokoh agama disebut dengan Kyai. Apalagi

---

<sup>15</sup> Daniel Hutagalung, "Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi," *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia* 12, No. 12 (2004): 1–17.

<sup>16</sup> Rosmah Tami and DKK, *Hegemoni (Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia)* (Samata: Alauddin University Press, 2021).

<sup>17</sup> Zezen Zaenudin Ali, "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) di Italia," *Jurnal YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3, No. 2 (2017): 63, <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.

<sup>18</sup> Yeshinta Varadella Anugrah, "Hegemoni Kyai Terhadap Santri," *Universal Declaration of Human Rights*, 2015, 1–6.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat totalitas tinggi penghormatan pada tokoh agama Kyai. Dengan totalitas ini, Kyai memiliki kekuasaan penuh untuk mempengaruhi masyarakat kelas bawah dalam menentukan pilihan politik di Madura.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Partisipasi Politik**

Sebelum membahas keterlibatan Kiai dalam kancah politik, alangkah baiknya mendefinisikan terlebih dahulu mengenai poin penting kajian ini, yaitu Kiai dan politik. Istilah Kiai merupakan Istilah asli Nusantara, tidak ada di negara manapun. Kata Kiai berasal dari bahasa Jawa Kuno “*kia-kira*” memiliki arti orang yang dihormati.<sup>19</sup> Menurut Kamus Besar Indonesia (KBI), Kiai adalah sebutan untuk seorang ulama atau orang yang cerdas dan pandai dalam agama Islam. Gelar Kiai diberikan oleh masyarakat tanpa harus di minta, orang yang dianggap mumpuni bidang ilmu agama, alim dan memiliki kebijaksanaan serta diterima keberadaannya.<sup>20</sup> Kiai dalam bahasa Madura dikenal dengan sebutan *Keaeh* atau *Ma'kaeh*.<sup>21</sup> Sebutan tokoh agama Islam di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, Aceh (Tengku), Minangkabau (Buya), Tapanuli (Syekh).<sup>22</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan politik berdasarkan penelusuran berbagai literatur kurang lebih sama. Etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, “polis” memiliki arti kota yang berstatus *city state* (Negara Kota).<sup>23</sup> Menurut KBI memiliki pengertian pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti halnya sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.<sup>24</sup> Menurut Miriam Budiardjo (2007), politik sebagai upaya untuk memperoleh kehidupan yang baik.<sup>25</sup> Begitupun yang dikemukakan Yusa Djuyandi (2017), hampir sama dengan pendapat Budiardjo, politik cara untuk memperjuangkan kepentingan bersama melalui negara, selain itu politik bagian dari seni untuk perubahan dan transformasi sebuah negara demokrasi yang damai.<sup>26</sup> Sederhananya politik adalah setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan kekuasaan dengan maksud mempengaruhi dan mempertahankan tatanan masyarakat dengan kekuasaan.<sup>27</sup> Bisa juga politik diartikan sebagai

---

<sup>19</sup> M. Syahrani Jailani, “Kepemimpinan Kyai dalam Merevitalisasi Pesantren,” 2016.

<sup>20</sup> Ahmad Hasan Afandi, *Kontroversi Politik Kyai Tarikat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarikat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah* (Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>21</sup> Edi Susanto, “Krisis Kepemimpinan Kiai: Studi Atas Kharisma Kiai Dalam Masyarakat,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1, No. 2 (2014): 111, <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.1.2.111-120>.

<sup>22</sup> Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai Dengan Santri di Pesantren,” *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2, no. 6 (2016): 385–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89>.

<sup>23</sup> Muhammad Muthari Ramadhani and DKK, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

<sup>24</sup> (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Politik>), Diakses, 07-08-2014.

<sup>25</sup> Subiyakto, “Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006).”

<sup>26</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

<sup>27</sup> Abdulkadir B Nambo and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik),” *MIMBAR: Jurnal Sosial Pembangunan XXI*, no. 2 (2005): 262–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>.

untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam literatur Islam, politik disebut dengan *siyasa*, memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>28</sup>

Dua definisi di atas, Kiai dan politik dalam lingkup Madura dua hal yang saling menguatkan. Politik sebagai alat atau cara untuk mendapat kekuasaan. Sedangkan Kiai ikut berpartisipasi dalam dinamika perpolitikan untuk mempengaruhi massa untuk mendapatkan jabatan politik. Partisipasi politik bertujuan untuk mengambil keputusan politik yang dilakukan oleh warga negara tanpa terkecuali, masyarakat biasa, pengusaha, tokoh agama, *Keaeh* (Kiai) dan lain-lain. Partisipasi masyarakat termasuk Kyai di kancah politik sebagai salah-satu syarat hidupnya demokrasi. Demokrasi tidak hidup tanpa adanya partisipasi politik masyarakat oleh warga negara, termasuk tokoh agama atau Kiai. Semakin dominan masyarakat berpartisipasi politik, maka semakin baik, sebab masyarakat lebih banyak memahami dan mengikuti masalah politik, serta mengambil peran di dalamnya.<sup>29</sup>

Partisipasi masyarakat termasuk Kiai dalam politik merupakan inti penting dari demokrasi. Menurut Saiful Mujani (2007), jantung demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam partisipasi politik. Mujani pengutip Brady (1999), konsep partisipasi dibagi empat, aksi, warga negara, politik dan pengaruh.<sup>30</sup> Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa tanpa ada keterlibatan masyarakat secara bebas dalam bernegara, maka demokrasi tidak bisa dibayangkan. Dari empat konsep partisipasi dalam konteks Madura sudah memenuhi, masyarakat dan tokoh agama (Kiai) dengan leluasa berpartisipasi dalam perpolitikan di Madura.

Kiai banyak terlibat dalam politik praktis dapat ditelusuri dari peralihan kekuasaan pada 21 Mei 1998 dari Presiden Soeharto kepada B.J Habibie membawa perubahan besar terhadap sistem perpolitikan di Indonesia, Kiai dan masyarakat pada umumnya memiliki keluasan ikut berpartisipasi dalam perpolitikan. Perubahan tersebut terlihat adanya transformasi politik dari sebelumnya otoriter ke arah demokratis. Sejak saat itu, proses demokratisasi terbuka lebar, mulai dari perubahan sentralisasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah, penerapan pemilu lebih demokratis, berlakunya sistem multipartai, adanya kebebasan pers, dan menjadikan aparat organisasi Militer netral secara politik.<sup>31</sup>

Atas kebebasan demokrasi, Kiai sebagai tokoh elite dalam masyarakat Muslim dapat dikategorikan unsur penting untuk mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, apabila seorang Kiai melibatkan diri untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menghimpun massa untuk memperoleh

---

<sup>28</sup> Abdurrahman, "Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik : Antara Gerakan Moral dan Politik," *KARSA* XV, No. 1 (2009): 27.

<sup>29</sup> Umar Halim and Kurnia Dyah Jauhari, "Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," *Jurnal ASPIKOM* 4, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v4i1.385>.

<sup>30</sup> Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 95.

<sup>31</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2019).

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

dukungan suara dari umat atau masyarakat, maka Kiai disebut dengan pelaku politik praktis. Namun bila Kiai terlibat dalam suatu kekuasaan dengan tujuan mengatur bernegara dan berbangsa agar berjalan sesuai dengan undang-undang, seperti yang dilakukan anggota parlemen, maka Kiai disebut praktisi politik. Tetapi, bila Kiai mempelajari, mengamati, observasi sesuai dengan metodologis dan pendekatan ilmiah, maka Kiai disebut dengan ilmuwan politik.<sup>32</sup>

Jadi, partisipasi Kiai secara umum publik dalam politik sangat dibutuhkan sebagai unsur penting hidupnya demokrasi di era reformasi. Suatu negara bisa dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi kriteria pemerintahan demokratis yang berbentuk adanya lembaga struktur demokrasi, dan adanya kultur demokratis dari lapisan masyarakat.

### **Pepatah Lokal Sebagai Dasar Kepatuhan Terhadap Kiai dalam Politik**

Kehidupan sosial-keagamaan masyarakat madura dikenal dengan kepatuhan kepada Kiai.<sup>33</sup> Totalitas dan penghormatan masyarakat Madura terhadap Kiai tergambar pada filosofi “*Buppa’ Babbu’ Guruh Rato*” (Bapak Ibu, Guru, dan Pemerintah). Secara jelas, pepatah tersebut mengandung nilai kepatuhan kepada orang tua, Kiai dan pemimpin. *Buppa’ Babbu’* (orang tua), mewakili keluarga, *Guruh* mewakili Kiai, dan *Rato* mewakili pemerintah atau penguasa<sup>34</sup>. Filosofi *Buppa’ Babbu’ Guruh Rato* telah terkontruksi dalam kehidupan masyarakat Madura yang berlangsung selama perjalanan sejarah yang begitu panjang. Sehingga filosofi ini menjadi pegangan hidup masyarakat Madura.<sup>35</sup>

Elemen pertama *Buppa’ Babbu’* (orang tua) berada pada struktur pertama. Orang tua atau keluarga merupakan pilar penting harus dijaga martabat dan kehormatannya. Karena ada struktur religio-kultural menjadi kewajiban yang dianjurkan agama bagi seseorang untuk berbakti kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan.<sup>36</sup> Dalam konteks tertentu, orang Madura menghormati orang lain sama halnya dengan menghormati keluarganya. Begitupun sebaliknya, menghina orang lain, sama dengan menghina semua keluarga. Menghormati orang lain bagi orang Madura manifestasi dan merefleksikan penghormatan kepada *Buppa’ Babbu’* (Bapak dan Ibu).

---

<sup>32</sup> Topan and Hakim, “The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation in Post-New Order Madura 1998-2019.”

<sup>33</sup> Zainuddin Syarif and Abd Hannan, “Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 16, No. 2 (2020): 7823–30.

<sup>34</sup> Muhammad Afdillah, *dari Masjid Ke Panggung Politik : Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur* (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), 2016).

<sup>35</sup> Mohammad Hefni, *Islam Madura: Sebuah Studi Konstruktivisme Strukturalis Tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung Sumenep Madura* (Malang: CV. Literasi Nusantra Abadi, 2019), 79.

<sup>36</sup> Moh Hefni, “Bhuppa’ Bhabhu’ Ghuru Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura),” *KARSA XI*, No. 1 (2007).

Elemen kedua adalah *Guruh* (Guru), nama *Guruh* di Madura merujuk pada Kiai, Ulama, Habaib, dan Ustadz. Kiai lebih tinggi kedudukannya daripada orang biasa lainnya pada umumnya, bahkan lebih tinggi dari birokrat pemerintah dan aparat negara.<sup>37</sup> Karena Kiai memiliki ilmu agama dan sekaligus menjadi tenaga pendidik (guru) yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada umat. Keberadaannya harus dihormati tidak boleh di ganggu, dihina, apalagi sampai dimusuhi. Sejelek-jeleknya orang Madura, entah itu blatir, pencuri, pemabuk, mereka tidak pernah lupa kepada *guruh* (Kiai), tetap menghormati. Fakta ini mengindikasikan, bahwa Kiai tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Madura. Sebab segala aktivitas orang Madura membutuhkan Kiai, tidak hanya pada aspek agama, melainkan pada aspek yang lain. Ada tradisi yang mengakar kuat di kalangan Masyarakat Madura, ketika orang Madura melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, berdagang, bertani, nelayan, atau profesi lainnya, selalu melibatkan Kiai untuk diminta barokah dan doa, agar pekerjaan yang dijalani sesuai dengan harapan.<sup>38</sup> Penghormatan masyarakat Madura kepada Kiai didukung dengan tradisi keagamaan, tahlilan, maulidan, selamatan, wiridan, pengajian rutin, istighosah, dan tradisi keagamaan lainnya.<sup>39</sup> Dalam praktik tradisi keagamaan tersebut membutuhkan Kiai untuk memimpin. Oleh sebab itu, Penghormatan masyarakat Madura kepada Kiai memiliki garis koherensi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan tradisi keagamaan.

Elemen ketiga hirarki filosofi Madura adalah *Ratoh* (Pejabat Publik). Masyarakat Madura patuh dan hormat terhadap pemerintah yang sah sesuai dengan konstitusional, melalui proses kesepakatan tertulis partai politik atau gabungan partai politik guna mewujudkan koalisi permanen terciptanya efektifitas pemerintah. Secara historis, rasa cinta dan nasionalis orang Madura terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak bisa diragukan lagi. Buktinya, masyarakat Madura ikut terlibat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan ikut mempertahankan kemerdekaan.<sup>40</sup> Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Belanda ingin merebut kembali negara jajahannya dengan melakukan agresi militer. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1947, pukul 13, 00 WIB, pasukan tank Belanda mendarat di Camplong (Sampang) dan sebagian di Tlanakan (Pamekasan) Madura untuk menguasai kembali daerah Madura. Tentu, para Kiai dan masyarakat Madura pada umumnya tidak tinggal diam, mengatur strategi melawan Belanda yang ingin merebut daerah Madura. Terjadilah pertempuran antar kolonial Belanda dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terdiri dari Sabilillah dipimpin K.H. Abd. Adhim Ening, Hizbullah dipimpin oleh Amiruddin, TNI dipimpin oleh Letnan II Syafi'I dan BPRI yang dipimpin oleh

---

<sup>37</sup> ST Kamilah and Oksiana Jatningsih, "Sosok Kiai dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 5, No. 3 (2017): 735–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n03.p%25p>.

<sup>38</sup> Romadhon, "Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon."

<sup>39</sup> H. Muhammad Samsuddin, *History Of Madura: Sejarah, Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura* (Yogyakarta: Araska, 2019), 62.

<sup>40</sup> Ali Topan, "Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) Terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2022): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

Masdu. Pertempuran Belanda dengan masyarakat Madura memakan korban satu truk terbakar dengan penumpangnya dari pihak Belanda. Sedangkan dari pejuang, satu orang meninggal ditemukan dibawah jembatan “Dingin” Desa Tlanakan dan lima laskar Sabillah luka-luka. Jadi, atas dasar inilah terbukti kecintaan orang Madura terhadap NKRI tidak bisa diragukan lagi.<sup>41</sup>

Dari tiga elemen di atas, kepatuhan dan penghormatan masyarakat Madura terhadap *Buppa' Babbu' Guruh Rato* (Orang Tua, Kiai dan Pemerintah) merupakan koheren yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. *Buppa' Babbu'* (orang tua), merupakan struktur makro, *Rato* (penguasa) struktur mikro, dan *Guruh* (Kyai, Ulama, Ustadz, Habaib) bagian dari struktur tengah menjembatani antara *Babba' Babbu* dan *Rato* (makro dan mikro).

### **Partisipasi Elite Lokal dalam Politik di Madura**

Berangkat dari definisi dasarnya, istilah elite merujuk pada suatu komunitas atau kelompok di dalamnya ada individu memiliki kualifikasi istimewa atau memiliki kedudukan tinggi dalam suatu lapisan masyarakat.<sup>42</sup> Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), elite adalah orang-orang pilihan dalam suatu kelompok atau orang yang memiliki derajat tinggi, kaum bangsawan, cendekiawan dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Senada dengan yang di katakan Thung Ju Lan (2010), elite merupakan kelompok masyarakat mempunyai keistimewaan dan kelebihan daripada masyarakat lain pada umumnya.<sup>44</sup>

Dalam konteks masyarakat Madura, elite merujuk pada kelompok kecil yang dihormati dan memiliki pengaruh, dalam hal ini elite lokal Madura adalah Kiai. Keberadaan Kiai di Madura sangat dihormati serta dimuliakan, disebabkan Kiai memiliki keistimewaan, kelebihan dan memiliki ilmu agama yang mumpuni. Selain Kiai, Blater di Madura dikategorikan sebagai elite. Keberadaannya sangat diperhitungkan dalam pusaran politik di Madura. Blater adalah orang yang memiliki massa tersendiri (Orang Kuat) di kalangan para bandit. Blater juga dikenal dengan dunia kriminal.<sup>45</sup> Namun dalam penelitian ini tidak membahas aktor politik Blater, hanya sekedar disinggung sebagai pengantar sub bab ini. Peneliti fokus pada elite politik Kiai.

Elite lokal Madura mewakili umat Muslim secara umum Madura, Kiai sebagai aktor berperan untuk mengatur kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Masuknya Kiai dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat termasuk politik, seringkali menentukan ketertarikan konstituen terhadap pilihan yang ditentukan Kiai, tidak lepas dari ketokohan Kiai menjadi

---

<sup>41</sup> Sulfan Afandi, “Perjuangan Rakyat Pamekasan Mempertahankan Kemerdekaan dalam Agresi Militer,” *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4, No. 2 (2016): 245–53.

<sup>42</sup> Ajat Sudrajat, “Kekuasaan dan Elite Politik Dalam Islam,” (Cakrawala Pendidikan, 1993), 83-93.

<sup>43</sup> <https://kbbi.web.id/elite-atau-elit>, Diakses pada 10/08/2024/

<sup>44</sup> Thung Ju Lan, “Studi Tentang Elit Indonesia: Problematika dan Pendekatan,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 2010, 101–16.

<sup>45</sup> Muh Syamsuddin, “Elit Lokal Madura : Sisi Kehidupan Kaum Blater,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, No. 1 (2015): 157 – 182 Pendahuluan.

*role model* serta memiliki ilmu agama yang mumpuni dan kharisma. Apalagi masyarakat Madura dikenal dengan penghormatan begitu tinggi terhadap Kiai. Maka sangat gampang bagi Kiai untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dalam perpolitikan di Madura. Namun, ada catatan dalam penelitian ini, tidak semua Kiai Madura terjun ke dunia politik, ada pula Kiai Madura *closed* (tertutup) mengisolasi diri dari dinamika politik, tidak mau tahu perihal politik.

Maka, perlu membedakan antara Kiai berpartisipasi dalam pusran politik dengan yang tidak terlibat. Kiai Madura dapat dibedakan menjadi lima kategori, Kiai *langgar*, Kiai pesantren, Kiai tarikat, Kiai mimbar (panggung), dan Kiai politik.<sup>46</sup> Lima kategori tersebut akan dibahas satu-persatu di bawah ini, sebagai berikut:

*Pertama*, Kiai *Langgar*, merujuk pada guru agama/*guruh ngajih* (guru ngaji) memiliki tempat khusus untuk mengajar (*morok*) disebut dalam bahasa Madura (*langgar*). Dalam tinjauan *historis*, konteks Madura dan Jawa, *langgar* merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional pertama mengajarkan nilai-nilai keislaman berperan penting untuk belajar agama bagi pemula.<sup>47</sup> *Langgar* simbol kereligiusan masyarakat Madura terhadap menjalankan ajaran agama Islam, buktinya hampir mayoritas rumah di Madura, terutama di Desa, depan rumahnya pasti ada *Langgar*, digunakan untuk tempat ibadah dan tempat belajar mengaji kepada Kiai. Relasi Kiai *langgar* dengan politik lokal Madura memberikan dampak signifikan pada pemilihan Kepala Desa. Para calon Kepala Desa mendatangi tokoh agama (Kiai) untuk meminta doa-restu agar terpilih menjadi kepala Desa. Atmosfer politik pemilihan Kepala Desa di Madura melebihi kontestasi politik pemilihan calon presiden, satu dengan yang lain saling memainkan strategi untuk memenangkan calon Kepala Desa yang di dukung. Bahkan tidak jarang disaat Pemilihan Kepala Desa suhu politik memanas, bisa memicu terjadinya konflik (*carok*). Sedangkan hubungan Kiai *Langgar* dengan politik tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional terjadi secara tidak langsung. Dengan alasan, kebanyakan Kiai *Langgar* tinggal di pedesaan, jauh dari jangkauan kota, untuk menghubungkan relasi Kiai *Langgar* dengan politik tingkat Kota melalui pihak ketiga, disebut dengan tim sukses, kemudian pendukung tingkat Desa menyampaikan pesan, program kerja, dan visi-misi kepada Kiai *Langgar*.

*Kedua*, Kiai pesantren, memusatkan perhatiannya pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, belajar di pesantren disebut dengan santri. Dalam pesantren, santri merupakan elemen kedua setelah Kiai, menentukan eksistensi pesantren di masa depan. Keberadaan santri di pesantren dapat menghubungkan orang tua santri dengan Kiai, secara tidak langsung orang tua santri menjadi pengikut Kiai. Keberadaan Kiai yang memiliki pesantren (lembaga pendidikan Islam) jauh lebih berkharisma dan berpengaruh

---

<sup>46</sup> Nofiaturrahmah, "Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia."

<sup>47</sup> Teguh and Imam Safi'i, "Sejarah Menjamurnya Masjid dan Langgar Pasca-65 di Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung," *Kontemplasi* 6, No. 02 (2018): 291–308, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/kontem.2018.6.2.291-308>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

daripada Kiai *Langgar*, hanya sebagai guru ngaji di surau/*Langgar*/Musholla. Dengan modal kharisma dan pengaruh, para politikus yang berinisiatif untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin di pemerintahan, baik Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Capres-cawapres melakukan safari politik ke lembaga pendidikan Islam (pesantren), untuk menemui Kiai sebagai pengasuh pesantren, tujuannya untuk meminta restu dan dukungan. Maka tidak jarang Kyai Madura memiliki pondok pesantren (lembaga pendidikan Islam) pada saat musim politik dihadiri para politikus.

*Ketiga*, Kiai Tarekat, fokus kegiatan pada membangun kebatinan umat Muslim. Secara kuantitas, pengikut Kiai Tarekat bisa lebih banyak daripada pengikut Kiai pesantren, melalui cabang-cabang di berbagai daerah di Indonesia, secara otomatis menjadi pengikut Kiai tarekat. Menurut Martin Van Bruinessen (1992), ada tiga tarikat tersebar luas dikalangan masyarakat Madura, Naqsyabandiyah, Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dan Tijaniyyah. Pengaruh tarikat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Madura tidak lepas dari Kiai Rejoso Jombang, menyebarkan pengaruhnya melalui badal-badal mereka. Namun setelah Kiai Musta'in Romly bergabung ke Golkar, tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mulai pelan-pelan kehilangan pengaruhnya di Madura. Dari tiga tersebut yang paling dominan pengikutnya adalah tarekat Naqsyandiyah, tarikat ini hadir ke Madura sejak abad ke-19.<sup>48</sup>

*Keempat*, Kiai Mimbar (panggung), dimaksud dengan Kiai mimbar/panggung adalah Kiai da'I atau pendakwah. Kiai panggung kegiatannya lebih banyak menyebarkan ajaran agama Islam melalui kegiatan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah-pindah. Selain memiliki ilmu agama yang mumpuni, Kiai panggung dituntut untuk memiliki sikap keberanian dan skil vokal berbicara di depan banyak jemaah. Ada beberapa Kiai panggung Madura dikenal banyak orang, seperti KH. Musleh Adnan dan KH. Kholil Yasin. Sebagai pendakwah, dikenal dengan ciri khas menyampaikan materi dakwah diselingi dengan humor. Adapun kontribusi Kiai panggung dalam praktik politik di Madura memberikan pencerahan pendidikan politik kepada umat, menyampaikan pesan dakwah kepada umat, bahwa tidak boleh bermusuhan meskipun beda pilihan politik, harus mengedepankan *ukhawah islamiyah*.

*Kelima*, Kiai Politik, Kiai terjun langsung pada dunia politik praktis, bagian pengurus partai politik dan mencalonkan diri menjadi pemimpin di pemerintahan dengan mekanisme diusung oleh partai politik. Kiai Madura terlibat pada politik praktis jumlahnya tidak sedikit, dari empat Kabupaten pemimpin daerah di Madura memiliki trah Kiai. persentuhan Kiai Madura dengan politik bukan hal yang baru, pasca Orde Baru aktor politik di Madura tidak lepas dari peran Kiai.

Khusus pada Kiai politik, seperti yang disebutkan peneliti di pendahuluan, secara *historis*, Kiai berperan mengusir penjajahan kolonialisme di Indonesia, tampak di beberapa

---

<sup>48</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarikat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), 175.

pesantren sebagai tempat untuk mengatur strategi mengusir penjajah. Setelah kemerdekaan, khususnya pada era reformasi, runtuhnya Orde Baru, tidak bisa dipungkiri, banyak pula terjun ke dunia politik dengan menjadi pemimpin kepala daerah. Dari empat kabupaten di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep pernah dipimpin seorang memiliki trah Kiai. Menurut penelitian Zainuddin Syarif (2016), Kiai di Madura ikut menjadi pejabat publik (Bupati), sebagai berikut:

**Tabel:** Kyai Madura di Pemerintahan Daerah

No	Kabupaten	Nama	Tahun
1	Bangkalan	K. Makmum Ibnu Fuad	2013-2018
		KH. R. Fuad Amin Imron	2003-2008/2008-2013
2	Sampang	KH. Fannan Hasib	2013-2018
3	Pamekasan	H. Baddrut Tamam	2013-2018
		KH. Kholilurrahman	2008-2013
4	Sumenep	KH. A. Busyro Karim	2010-2015

**Sumber:** artikel Jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam (Zainuddin Syarif, 2016).

Tabel di atas mengindikasikan bahwa Kiai tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam perpolitikan di Madura, akan tetapi mengambil bagian dari politik, menjadi kepala daerah. Terpilihnya Kiai sebagai kepala daerah tidak lepas dari ketokohan dirinya memiliki garis keturunan Kiai. Trah ini menjadi magnet popularitas politik sebagai daya tawar kepada umat.<sup>49</sup> Hubungan masyarakat dengan Kiai diperkokoh adanya emosional keagamaan, sehingga Kiai memiliki power besar bagi kehidupan masyarakat Madura, dianggap tokoh pemersatu masyarakat. Itulah sebabnya, Kiai Madura dengan mudah memenangkan pertarungan politik di kancah pemilihan kepala daerah.

Oleh sebab itu, perjalanan sejarah panjang kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Madura kandidat calon berasal dari trah Kiai. Begitupun Pilkada serentak 2024 di Madura Pamekasan salah-satu calonnya berasal dari pendatang lama, pernah menjadi Bupati Pamekasan dari kalangan Kiai, KH. Kholilurrahman dipastikan calon Bupati Pamekasan mendaftar ke KPU Pamekasan pada 28/08/2024/. KH. Kholilurrahman dan H. Sukriyanto sebagai wakil diusung empat koalisi partai, Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gelora, dan Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>50</sup> KH. Kholilurrahman dan H. Sukriyanto akan menghadapi

<sup>49</sup> Kudrat Hannan, Abd & Abdullah, "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial," *Sosial Budaya* 16, No. 1 (2019): 9.

<sup>50</sup> "Ketua DPC Partai Demokrat Pimpin Pendaftaran Paslon Kholil-Sukri Ke KPU Pamekasan," *Karimata.NET*, Pamekasan, 2024, Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gelora, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

dua pasangan calon lainnya, Fattah Jasin dan KH. RPA. Mujahid Ansori serta pasangan RKH Mohammad Baqir Aminatullah dan Taufadi.<sup>51</sup>

Tentu, terjunnya Kiai dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Madura memiliki tujuan dan alasan. Umumnya alasan tersebut bisa berupa. *Pertama*, adanya suatu keyakinan yang berasal dari ajaran agama Islam, dakwah dan perjuangan tidak selalu melalui nilai spiritual, melainkan bisa melalui aspek kehidupan lainnya, seperti aspek politik. *Kedua*, aspek historis, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran Ulama atau Kyai yang berjuang untuk mengusir penjajah, melalui perlawanan dan diplomasi serta lembaga pendidikan tradisional (pesantren) dijadikan tempat untuk mengatur strategi melawan penjajah. *Ketiga*, sebagai elite agama, Kiai bisa mengontrol dan memobilisasi masyarakat serta bisa mengambil keputusan atas persoalan yang ada di masyarakat.<sup>52</sup>

Namun, menurut Syahidah (2022), Kepercayaan masyarakat Madura kepada Kiai dalam politik mengalami sedikit pergeseran perilaku, hal ini terlihat pada pemilihan tahun 1999, dimana masyarakat memberanikan diri untuk berbeda pilihan dengan Kiai yang sejauh ini menjadi acuan dari segala aspek.<sup>53</sup> Menurut peneliti, pergeseran perilaku politik pada pemilihan 1999, dilakukan hanya beberapa orang, tidak mewakili orang Madura secara keseluruhan. Buktiknya pemilihan berikutnya, suara Kiai masih didengar oleh masyarakat Madura, dan calon yang didukung Kiai memperoleh suara dominan.

Kepercayaan masyarakat Madura pada Kiai terlihat pada pemilihan gubernur Jawa Timur, sebagian Kiai memberikan kontribusi ketokohnya untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil.<sup>54</sup> Terbukti pasangan Khofifah-Emil di Madura hampir memperoleh suara mayoritas dari empat kabupaten. Sumenep memperoleh 248.074 suara.<sup>55</sup> Pamekasan Khofifah-Emil jumlah suara 343.494.<sup>56</sup> Sampang, Khofifah-Emil memperoleh 339.222 suara.<sup>57</sup> Dari empat Kabupaten di Madura pasangan Khofifah-Emil hanya kalah di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 261.467, lawan politiknya Ipul-Pati mendapat 271.088 suara.<sup>58</sup>

---

<sup>51</sup> "10 Parpol Pengusung dan Pendukung Paslon Fattah Jasin-Mijahid Ansori Mendaftar Ke KPU Pamekasan," Memontum Pamekasan, 2024, <https://memontum.com/10-parpol-pengusung-dan-pendukung-paslon-fattah-jasin-mujahid-ansori-mendaftar-ke-kpu-pamekasan>.

<sup>52</sup> Jihan Amalia Syahidah, "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 2, No. 2 (2022): 213–25, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>.

<sup>53</sup> Amalia Syahidah, 2022.

<sup>54</sup> Republika.co.id, "Ratusan Kiai di Madura Dukung Khofifah-Emil," 2018, <https://news.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/05/19/p8z86a428-ratusan-kiai-di-madura-dukung-khofifahemil?>

<sup>55</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, "No Title," n.d., <https://kab-sumenep.kpu.go.id/>.

<sup>56</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, "KPU Kabupaten Pamekasan," n.d., <https://kab-pamekasan.kpu.go.id/>.

<sup>57</sup> "KPU Kabupaten Sampang," n.d.

<sup>58</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, "No Title," n.d., <https://kab-bangkalan.kpu.go.id/>.

*Power* ketokohan Kiai juga memberikan kontribusi pada kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.<sup>59</sup> Salah-satu faktor kemenangan Prabowo di Madura Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tidak lain memperoleh restu dan dukungan dari Kiai Madura. Pada pilpres 2024, Kiai Madura beralih dukungan dari Prabowo Subianto ke pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, tidak lagi mendukung Prabowo Subianto, dikarenakan Prabowo masuk kabinet Jokowi. Sebagian Kiai Madura terang-terangan mendukung pencalonan AMIN (Anies & Gus Imin).<sup>60</sup> Kiai tersebut ikut dalam kampanye akbar Anies di Madura, beberapa Kiai diketahui hadir dan ikut serta ke lapangan Garuda Palengaan Laok Pamekasan untuk mengempanyakan Kemenangan AMIN (Anies dan Muhaimin).<sup>61</sup> Anies & Gus Imin menang di Pamekasan dengan perolehan suara 337.122, Prabowo-Gibran 251.527, dan Ganjar-Mahfud 39.445. Juga di Sampang Anies & Gus Imin menang dengan memperoleh suara 372.669 suara, Prabowo-Gibran 308.580, Ganjar-Mahfud 46.593. Sedangkan di Bangkalan dan Sumenep Anies & Gus Imin kalah, dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran.<sup>62</sup>

Kontestasi politik Pilpres 2024 di Madura, sedikit berbeda dari Pilpres sebelumnya. Pilpres 2014-2019, Ulama dan Kiai mendukung Prabowo, akan tetapi Pilpres 2024, Kiai yang dulunya mendukung Prabowo beralih mendukung Anies Baswedan, namun tidak memperoleh suara dominan. Sebenarnya Madura dalam kontestasi politik Pilpres 2024 basisnya 03 (Ganjar Pranowo & Mahfud MD) dan 01 (Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar), karena wakil dari 03 (Mahfud MD) asli putra daerah Madura Pamekasan, merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Madura, justru 03 yang diwakili Mahfud MD kalah di daerahnya sendiri. Begitupun Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar tidak menunjukkan angka dominan keseluruhan, padahal masyarakat Madura fanatik terhadap simbol-simbol keagamaan, seperti Kiai dan organisasi keagamaan. Pasangan Anies & Muhaimin didukung orang yang memiliki simbol keagamaan (Kiai), dan diusung partai politik yang berbasis Islam, PKS dan PKB, partai PKB representasi dari NU, masyarakat Madura kental dengan NU, hampir mayoritas masyarakat Madura berafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU), faktanya Anies & Muhaimin tidak bisa mendongkrak memperoleh suara dominan di Madura. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah-satunya suara masyarakat Madura terbagi ke beberapa calon, sebagian elite-elite lokal Madura mempertahankan kesetiaannya mendukung Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014-2019 dan bahkan Pilpres 2024, terbukti Prabowo Subianto mendapat suara dominan dari dua kabupaten di Madura (Sumenep dan Bangkalan), kalah tipis di Kabupaten Pamekasan dan Sampang dari pasangan 01. Faktor kedua kaitanya dengan wakil dari calon 03 (Mahfud Md),

---

<sup>59</sup> Nur Elya Anggraini, *Mereka yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potrit Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur* (Media Sahabat Cendekia: surabaya, 2019).

<sup>60</sup> Kba News, "Empat Ulama Kharismatis Madura Deklarasikan Dukungan Kepada Anies Baswedan," 2023, <https://kbanews.com/hot-news/empat-ulama-kharismatis-madura-deklarasikan-dukungan-kepada-anies-baswedan/>.

<sup>61</sup> Pengamatan Peneliti Langsung Dilapangan, kampanye Anies-Gus Imin di Lapangan Garuda Palengaan Laok Pamekasan Sebelum pilpres 2024.

<sup>62</sup> "Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024," Komisi Pemilihan Umum, 2024, <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/rekapitulasi/35/3529>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

asli orang Madura, meskipun 03 (Ganjar-Mahfud) perolehan suara tidak sedominan calon yang lain, namun yang pasti dapat mengurangi dan pengembosan suara 01 dan 02 di Madura. Faktor ketiga dipengaruhi elite penting Jawa Timur, salah-satunya Khofifah Indar Parawansa (Mantan Gubernur Jawa Timur), diketahui Khofifah bagian dari struktur NU menyatakan dukungan terhadap pasangan 02 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dukungan elite Jawa Timur terhadap salah-satu paslon akan mempengaruhi situasi politik di Madura, karena Madura sendiri bagian dari Jawa Timur.

Tentu, keberpihakan dan dukungan Kiai terhadap salah-satu paslon memiliki dasar yang kuat, bisa jadi kesamaan atribut keagamaan, cara pandang menanggapi isu keagamaan dan keumatan atau isu yang berkaitan dengan kenegaraan. Selain itu, menurut Abdul Wahid Hasyim, ada tiga faktor melatarbelakangi keterlibatan Kiai ke panggung politik, agama, ekonomi dan sosio-kultural. *Pertama*, agama, keterlibatan Kiai pada politik praktis dimaknai sebagai pengabdian khalifah di muka bumi untuk kepentingan umat memperoleh kehidupan adil, makmur, dan sejahtera. Khalifah diberikan amanah untuk mengelola dunia supaya bermanfaat bagi seluruh makhluk.<sup>63</sup> Melalui jalur politik, Kiai sebagai khalifah harus mampu menyebarkan Rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, menegakkan keadilan sesuai dengan anjuran agama dan konstitusi yang berlaku, memberantas penyelewengan yang merugikan orang banyak, seperti korupsi, dan berlaku adil pada semua umat tanpa membedakan ras, suku maupun budaya.<sup>64</sup> Tugas kepentingan umat tersebut lebih mudah dicapai melalui jalur politik, yang mana Kiai ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kancah politik demi kepentingan orang banyak. *Kedua*, ekonomi, Kiai di dorong untuk memperkuat dan memperjuangkan ekonomi umat yang masih termarginal. Dengan masuknya Kiai ke politik dan berpartisipasi di dalamnya dapat melakukan pembelaan dan membuat regulasi kemajuan ekonomi umat yang masih jauh dari kata sejahtera. Oleh sebab itu, Kiai masuk kontestasi politik demi memperjuangkan ekonomi umat dengan merumuskan kebijakan impor-ekspor, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ketenagakerjaan umat. Semua kebijakan mengenai ekonomi umat dengan mudah dipraktekan apabila Kiai menjadi pejabat publik atau menjadi orang nomor satu yang membuat kebijakan. *Ketiga*, sosio-kultural, menarik ketika membahas Islam di Madura dan tradisi keagamaannya, maka dihadapkan pada satu corak tunggal yang mewakili keislaman masyarakat Madura, yang disebut dengan *Nahdlatul Ulama* (NU), Bagi masyarakat Madura, NU dianggap sebagai organisasi yang paling benar, sedangkan organisasi lain diluar NU dianggap “tidak benar”. ketika orang Madura ditanya perihal agama, terkhusus orang Madura yang tinggal di pedesaan, respons cepat menjawab NU, bukan Islam. Ini menandakan Islam dan organisasi keislaman (NU) di Madura merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pastinya ciri khas tradisi keagamaan di Madura tidak lepas dari tahlilan, maulidan, yasinan dan tradisi-tradisi

---

<sup>63</sup> KH Zakky Mubarak, “KH Zakky Mubarak: Manusia Sebagai Khalifah Bumi,” NU Online, 2023, <https://jabar.nu.or.id/kota-bandung/kh-zakky-mubarak-manusia-sebagai-khalifah-bumi-6yLPr>.

<sup>64</sup> Rahmat Ilyas, “Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam,” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, No. 1 (2016): 169–95, <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.

lokal lainnya. Berbicara praktik tradisi keagamaan di Madura termasuk hal yang urgen, tradisi keagamaan (tradisi nahdliyin) betul-betul dijaga, dirawat dan diwariskan dari generasi ke generasi, tidak boleh diganggu oleh kelompok lain, apabila mencoba untuk menghilangkan tradisi tersebut pasti menimbulkan terjadinya konflik, seperti di Madura Pamekasan, sejak tahun 2010-2023 sering terjadi konflik keagamaan, penyebabnya kelompok lain mencoba untuk menghilangkan tradisi keagamaan masyarakat Madura.<sup>65</sup>

Selain tujuan kepentingan di atas, ada pula kepentingan politik hukum yang diinginkan oleh Kiai. Politik hukum yang dimaksud adalah penerapan hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan kultur yang ada. Seperti politik hukum yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan Madura, Perda No. 18 Tahun 2001, Larangan minuman beralkohol. Surat Edaran Bupati No. 450 Tahun 2002, keharusan memakai Jilbab bagi karyawan pemerintah, menutup kegiatan diwaktu azan berkumandang, penambahan jam pelajaran agama Islam, dan keharusan memakai baju koko dan kopiah setiap hari jumat bagi karyawan. Perda No. 18 Tahun 2004, larangan terhadap prostitusi. Perda No. 40 Tahun 2009 Tentang pendidikan agama. Terakhir Keputusan Bupati No. 188 Tahun 2009 Tentang penetapan gerbang salam sebagai modal dan strategi dakwa.<sup>66</sup> Praktik hukum berupa perda maupun perbup syariah di Pamekasan tidak lepas dari keterkaitan politik hukum aktor atau elite.

Apabila politik hukum di rancang oleh pihak berwenang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat di Madura yang mayoritas Muslim, dikenal dengan Muslim religius oleh masyarakat luar Madura, maka Kiai, santri, alumni dan partisipan masyarakat biasa pada umumnya melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes ketidaksetujuan dengan rancangan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pihak berwenang, seperti PP No. 28 Tahun 2024 yang melegalkan alat kontrasepsi terhadap pelajar dan siswa. PP No. 28 Tahun 2024 direspons berbagai pihak, termasuk MUI, menurutnya seakan-akan membolehkan menggunakan alat kontrasepsi.<sup>67</sup> Begitupun Kiai di Madura ikut merespons kebijakan pemerintah tersebut, melakukan aksi ke lapangan. Bisa dilihat gambar di bawah ini.

---

<sup>65</sup> Ali Topan, "Potret Kehidupan Umat Beragama (Studi Kasus Penolakan Wahabi-Salafi di Pamekasan Madura 2010-2023)," *ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2024): 67–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v6i1.12589>.

<sup>66</sup> Agus Purnomo, "Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan," *ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, No. 1 (2014): 4.

<sup>67</sup> "PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kumham MUI," MUI, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/pp-28-tahun-2024-dan-aturan-kontrasepsi-yang-rentan-masalah-begini-catatan-kumham-mui>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***



**Sumber:** hasil foto pribadi di lokasi

Gambar di atas memberikan informasi bahwa aksi dilakukan oleh Kiai dan Kaum santri bertujuan untuk menyuarakan aspirasi, protes dan tuntutan terhadap pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Kiai Madura tidak hanya sebatas tokoh agama, melainkan sebagai *checks and balances* untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman.

Begitupun PCNU Pamekasan turut merespons PP No. 28 Tahun 2024. Menurut KH Taufik Hasyim, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan, “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Penyediaan alat kontrasepsi terkesan memberikan peluang perizinan terhadap pelajar dan remaja. Meski PP tersebut dengan tujuan mencegah penyakit, namun memberikan izin lebih berbahaya daripada tujuan. Sebagai bentuk dan upaya menolak PP No. 28 Tahun 2024, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan bersama umat Muslim Pamekasan mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.<sup>68</sup>

Atas dasar inilah, memilih pemimpin sebagai wakil rakyat harus berorientasi pada keinginan yang diwakili (Rakyat). Disitulah Kiai berperan dan mengimbau kepada umat agar tidak salah memilih pemimpin, memberikan arahan untuk memilih pemimpin yang pro terhadap kepentingan umat. Tentu, himbauan Kiai sudah melalui ritual keagamaan, mana calon yang baik dan yang tidak. Dilain sisi, untuk mencapai tujuan kepentingan umat, Kiai harus terlibat berpartisipasi dalam politik, baik Kiai mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau memberi dukungan terhadap orang-orang politik yang dianggap baik untuk

---

<sup>68</sup> “Sikapi PP No 28 Tahun 2024, Kiai Taufik: “Mencegah Lebih Diutamakan Daripada Mendatangkan Kemaslahatan,” Media NU Pamekasan, 2024, [https://www.google.com/search?q=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&oq=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBNIBCjMwMTcwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&oq=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBNIBCjMwMTcwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

mencalonkan diri menjadi pemimpin di pemerintahan. Harapan Kiai mendukung pasangan calon pejabat, tidak lain ketika mereka menang, bisa mendengar arahan Kiai dan mau memperjuangkan hak umat. Pengaruh Kiai dalam politik di Madura disebabkan adanya kepatuhan sangat tinggi masyarakat Madura pada Kiai, apalagi Kiai memiliki lembaga pendidikan pesantren. Dalam kancah politik, Kiai yang memiliki pesantren jauh lebih berpengaruh daripada Kiai yang tidak memiliki pesantren.<sup>69</sup> Kepatuhan masyarakat dijadikan strategis jitu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Ketokohan Kiai sebagai orang yang paham agama menjadi sebab dapat mempengaruhi untuk memilih salah-satu paslon, baik DPR/DPRD maupun kepala daerah bahkan tingkat pusat.<sup>70</sup>

Kiai sebagai paham ilmu agama, memainkan peran perantara bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai isu yang terjadi di tingkat nasional, isu keagamaan, keumatan atau isu politik. Masyarakat yang tinggal di Desa menganggap dirinya sebagai *wong cilik* (orang kecil) atau orang awam, sadar bahwa tidak tahu banyak pengetahuan memahami peristiwa yang lagi viral dalam kancah nasional. Hubungan Kiai dengan masyarakat begitu dekat ini menempatkan Kiai sebagai penerjemah untuk menjelaskan isu-isu yang terjadi, termasuk yang tampak, isu politik.<sup>71</sup> Ini terjadi karena Kiai merupakan bagian elite politik.

Strategi politik menggunakan jejaring ketokohan dan simbol-simbol keagamaan di Madura merupakan hal penting. Maka tak jarang ketika orang ingin menjadi pejabat publik melakukan safari politik kepada Kiai pesantren untuk meminta restu dan doa, serta tidak kalah pentingnya meminta dukungan politik. Peran strategis Kiai pesantren cukup meyakinkan kemenangan terhadap orang yang di dukung. Sebab, pesantren lembaga pendidikan agama banyak diminati masyarakat Madura. Secara otomatis, ketika Kiai mendukung paslon tertentu, santri dan wali santri mengikuti pilihan Kiai. Apalagi Madura dikenal dengan seribu pesantren yang tersebar di berbagai daerah di Madura.

**Tabel:** Jumlah Pesantren di Madura tahun 2013

NO	KABUPATEN	JUMLAH PESANTREN
1	Bangkalan	236
2	Sampang	418
3	Pamekasan	201
4	Sumenep	239

**Sumber:** Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/xloq1395925488>.

Dari kuantitas pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah Madura menandakan bahwa lembaga pendidikan pesantren menjadi lembaga pendidikan utama bagi masyarakat Madura. Bahkan pejabat pemerintah daerah sekalipun juga alumni pendidikan

<sup>69</sup> Ferry Muham m adsyah Siregar and Saidin Edan, Keterlibatan Pesan Tren dalam Politik: Studi Kasus Pesan Tren di Yogyakarta," *Kontekstualita* 25, No. 2 (2010): 208.

<sup>70</sup> Hannan, Abd & Abdullah, "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial."

<sup>71</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: PT LKis, 2004), 2.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

pesantren. Ambil contoh pejabat daerah Kabupaten Pamekasan, mantan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Ahmad Syafi'i merupakan alumni pondok pesantren.<sup>72</sup> Begitupun beberapa yang pernah duduk di lembaga legislatif pernah mengenyam pendidikan pesantren. Diantaranya Zuhaini Rachim dan Fariduddin Tamim. Apalagi masyarakat biasa pada umumnya, lembaga pendidikan pesantren menjadi pilihan utama yang harus didahulukan. Sebagai masyarakat yang taat kepada Kai, penghormatan masyarakat Madura terhadap Kiai tidak pernah pudar meski Kiai tersebut menjadi pejabat pemerintah. Ada beberapa alasan legitimasi kekuatan Kiai di Madura, diantaranya:

*Pertama*, Kiai memiliki jejaring kekerabatan yang kompleks, mulai dari kekerabatan melalui jalur pernikahan, ikatan Kiai dengan santri, kesamaan organisasi, dan jejaring pesantren. Posisi Kiai dalam pesantren memiliki tempat strategis dalam masyarakat, tidak hanya menentukan "benar" dan "salah", akan tetapi bisa mengendalikan perilaku masyarakat.<sup>73</sup> Kuatnya jejaring Kiai, mengindikasikan Kyai memiliki basis kekuatan yang luas, dari tingkatan masyarakat atas maupun lapisan masyarakat tingkat bawah. Kekuatan ini memberikan dampak tingkat kepatuhan masyarakat pada Kiai, sehingga berdampak pula terhadap kepercayaan masyarakat pada Kiai, termasuk kepercayaan politik.

*Kedua*, Kharisma Kiai, dengan modal yang dimiliki Kiai (Kharisma) Kiai di Madura dipercaya sebagai orang yang bisa mengatasi permasalahan umat mengenai *ubudiyah*, Kiai sering diminta untuk menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>74</sup> Tak jarang masyarakat Madura ketika ada masalah, meminta bantuan Kiai, Kiai sebagai tempat mengadu, mengobati orang sakit, dan diminta untuk melariskan dagangan. Selain itu, Kiai diminta untuk menentukan pilihan politik. Begitupun sebaliknya, pilihan Kiai, otomatis pilihan masyarakat. Makanya, Kiai di Madura menentukan kemenangan salah-satu paslon, baik legislatif maupun yudikatif.

*Ketiga*, ilmu agama, Kiai menjadi figur atau panutan masyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan kemampuan ilmu agama yang mereka miliki, termasuk keputusan politik<sup>75</sup>. Oleh sebab itu, Kiai dituntut untuk memiliki pengetahuan agama yang luas, menjadi pembeda dengan masyarakat biasa pada umumnya.

Dari tiga poin di atas menentukan pengaruh Kiai dalam masyarakat Madura, dikarenakan ketiganya (pesantren, kharisma, dan ilmu agama) saling berkaitan. Kiai yang memiliki lembaga pendidikan Islam (pesantren) menurut pandangan masyarakat Madura,

---

<sup>72</sup> Sahid, "The Views Of Kiai Of Nu Board Members on The Formalization Of Sharīa Law," *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, No. 2 (2011): 395–420.

<sup>73</sup> Nofiaturrahmah, "Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik kebangsaan di Indonesia."

<sup>74</sup> Susanto, "Krisis Kepemimpinan Kiai: Studi Atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat."

<sup>75</sup> Agung Wijaksono and Taufik Rizki Sista, "Kultur Pesantren: Background Kyai, Output Santri, dan Marketable Pesantren," *Wijaksono, Agung Sista, Taufik Rizki* 1, no. 1 (2023), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/9491>.

dipastikan memiliki bidang ilmu agama yang mumpuni, sehingga Kiai tersebut dikategorikan kharismatik dan pantas menentukan pilihan politik.

## **Kesimpulan**

Elite politik Kiai di Madura memiliki pengaruh yang signifikan dalam kontestasi politik pada era reformasi. Pengaruh ini didasari oleh penghormatan tinggi masyarakat Madura terhadap Kiai, yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan ahli dalam ilmu agama. Karena itu, dalam menyelesaikan berbagai problematika sosial, masyarakat sering kali melibatkan Kiai untuk mendapatkan arahan, termasuk dalam memilih pemimpin politik. Kehadiran Kiai dalam kontestasi politik memberikan kontribusi nyata, terutama dalam upayanya untuk menyesuaikan aturan daerah dengan nilai-nilai mayoritas Muslim di Madura. Dalam bidang ekonomi, Kiai berperan dalam legislasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Sementara itu, dalam bidang sosial-budaya, Kiai menjaga dan membumikan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian, keterlibatan langsung Kiai dalam politik, termasuk mendukung calon kepala daerah dan calon legislatif, menjadi penting untuk merealisasikan kepentingan masyarakat Madura.

## **Daftar Pustaka**

- A'la, Abd, and DKK. "Islam dan Agamaisasi Politik: Studi Analisis Terhadap Peran dan Pergerakan Forum Kiai Muda (FKM) Pamekasan Madura." *Jurnal Review Politik* 8, No. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jrp.2018.8.1.%25p>.
- Abdurrahman. "Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik : Antara Gerakan Moral dan Politik." *KARSA XV*, No. 1 (2009): 27.
- Afandi, Ahmad Hasan. *Kontroversi Politik Kyai Tarikat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarikat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah*. Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Afandi, Sulfan. "Perjuangan Rakyat Pamekasan Mempertahankan Kemerdekaan dalam Agresi Militer." *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4, no. 2 (2016): 245–53.
- Afdillah, Muhammad. *dari Masjid Ke Panggung Politik : Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), 2016.
- Ahadiyah, Kana Lailatul. "Relasi Sosial Antara Kyai Non Politik dan Kyai Politik di Komunitas Religius Pedesaan," 2018, 1–21.
- Ali, Zezen Zaenudin. "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) di Italia." *Jurnal YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3, No. 2 (2017): 63. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.
- Amalia Syahidah, Jihan. "Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura." *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 2, No. 2 (2022): 213–25. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7992>.

## ***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

- Anggraini, Nur Elya. *Mereka Yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potrit Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur*. Media Sahabat Cendekia: Surabaya, 2019.
- Anugrah, Yeshinta Varadella. "Hegemoni Kyai Terhadap Santri." *Universal Declaration of Human Rights*, 2015, 1–6.
- Bangkalan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. "No Title," n.d. <https://kab-bangkalan.kpu.go.id/>.
- Bruinessen, Martin Van. *Tarikat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1992.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fauziyah, Asmaul. "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989." Universitas Islam Negeri (UIN) SUNAN Ampel Surabaya, 2019.
- Halim, Umar, and Kurnia Dyah Jauhari. "Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017." *Jurnal ASPIKOM* 4, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v4i1.385>.
- Hannan, Abd & Abdullah, Kudrat. "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial." *Sosial Budaya* 16, No. 1 (2019): 9.
- Hefni, Moh. "Bhuppa' Bhabhu' Ghuru Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis Tentang Hierarkhi Kepatuhan Dalam Budaya Masyarakat Madura)." *KARSA XI*, no. 1 (2007).
- Hefni, Mohammad. *Islam Madura: Sebuah Studi Kontruktivisme Strukturalis Tentang Relasi Islam Pesantren Dan Islam Kampung Sumenep Madura*. Malang: CV. Literasi Nusantra Abadi, 2019.
- Hidayat, Mansur. "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren." *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2, No. 6 (2016): 385–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89>.
- Hutagalung, Daniel. "Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi." *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia* 12, No. 12 (2004): 1–17.
- Ilyas, Rahmat. "Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, No. 1 (2016): 169–95. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>.
- Jailani, M. Syahrani. "Kepemimpinan Kyai dalam Merevitalisasi Pesantren," 2016.
- Kamilah, ST, and Oksiana Jatningsih. "Sosok Kiai dalam Konstruksi Intelektual Muda Bangkalan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 5, No. 3 (2017): 735–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n03.p%25p>.
- Karimata.Net, Pamekasan. "Ketua DPC Partai Demokrat Pimpin Pendaftaran Paslon Kholil-Sukri Ke KPU Pamekasan," 2024. Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gelora, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
- Komisi Pemilihan Umum. "Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024," 2024. <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/rekapitulasi/35/3529>.
- "KPU Kabupaten Sampang,".

- Lan, Thung Ju. "Studi Tentang Elit Indonesia: Problematika dan Pendekatan." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 2010, 101–16.
- Madjid, M. Dien, and Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Media NU Pamekasan. "Sikapi PP No 28 Tahun 2024, Kiai Taufik: "Mencegah Lebih Diutamakan Daripada Mendatangkan Kemaslahatan," 2024. [https://www.google.com/search?q=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&oq=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBNIBCjMwMTcwajBqMTWoAgIwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&oq=pecnu+pamekasan+respons+PP+no+28+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBNIBCjMwMTcwajBqMTWoAgIwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Memontum Pamekasan. "10 Parpol Pengusung Dan Pendukung Paslon Fattah Jasin-Mijahid Ansori Mendaftar Ke KPU Pamekasan," 2024. <https://memontum.com/10-parpol-pengusung-dan-pendukung-paslon-fattah-jasin-mujahid-ansori-mendaftar-ke-kpu-pamekasan>.
- Moesa, Ali Maschan. "Agama dan Politik : Studi Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme Pasca Orde Baru. Disertasi Thesis, Universitas Airlangga." Universitas Airlangga Surabaya, 2006. <https://repository.unair.ac.id/32568/>.
- Mubarak, KH Zakky. "KH Zakky Mubarak: Manusia Sebagai Khalifah Bumi." NU Online, 2023. <https://jabar.nu.or.id/kota-bandung/kh-zakky-mubarak-manusia-sebagai-khalifah-bumi-6yLPr>.
- MUI. "PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi Yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kumham MUI," 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/pp-28-tahun-2024-dan-aturan-kontrasepsi-yang-rentan-masalah-begini-catatan-kumham-mui>.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Bari*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nambo, Abdulkadir B, and Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)." *MIMBAR: Jurnal Sosial Pembangunan* XXI, no. 2 (2005): 262–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>.
- News, Kba. "Empat Ulama Kharismatis Madura Deklarasikan Dukungan Kepada Anies Baswedan," 2023. <https://kbanews.com/hot-news/empat-ulama-kharismatis-madura-deklarasikan-dukungan-kepada-anies-baswedan/>.
- Nofiaturrahmah, Fifi. "Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan di Indonesia." *Jurnal Islamic Review* 3, no. 1 (2014): 1–32.
- NU Online. "NU dan Pemilu Pertama di Indonesia Tahun 1955," 2019. <https://www.nu.or.id/fragmen/nu-dan-pemilu-pertama-di-indonesia-tahun-1955-Hf6jW>.
- Pamekasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. "KPU Kabupaten Pamekasan," n.d. <https://kab-pamekasan.kpu.go.id/>.
- Purnomo, Agus. "Politik Hukum Elit Politik Kabupaten Pamekasan." *ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 4.

***Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik Era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah - Ali Topan, Itaanis Tianah***

- Ramadhani, Muhammad Muthari, and DKK. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Republika.co.id. "Ratusan Kiai di Madura Dukung Khofifah-Emil," 2018. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/05/19/p8z86a428-ratusan-kiai-di-madura-dukung-khofifahemil?>
- Romadhon, Sukron. "Kiai Bagi Orang Madura Sukron Romadhon." *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 2020, 35–42.
- Sahid. "The Views Of Kiai Of Nu Board Members On The Formalization Of Shar'ia Law." *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, no. 2 (2011): 395–420.
- Samsuddin, H. Muhammad. *History Of Madura: Sejarah, Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura*. Yogyakarta: Araska, 2019.
- Siregar, Ferry Muhammad Adsyah, and Saidin Ern as. "Keterlibatan Pesan Tren dalam Politik: Studi Kasus Pesan Tren di Yogyakarta." *Kontekstualita* 25, no. 2 (2010): 208.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, no. 1 (2018): 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Subiyakto, R. "Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2011): 41–50. [http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-Last\\_47\\_56.pdf](http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-Last_47_56.pdf).
- Sudrajat, Ajat. "Kekuasaan Dan Elite Politik Dalam Islam." *Cakrawala Pendidikan*, 1993.
- Sumenep, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. "No Title," n.d. <https://kab-sumenep.kpu.go.id/>.
- Susanto, Edi. "Krisis Kepemimpinan Kiai: Studi Atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2014): 111. <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.1.2.111-120>.
- Syamsuddin, Muh. "Elit Lokal Madura: Sisi Kehidupan Kaum Blater." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 157 – 182 Pendahuluan.
- Syarif, Zainuddin. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura." *Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 293–311. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.500>.
- Syarif, Zainuddin, and Abd Hannan. "Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2020): 7823–30.
- Tami, Rosmah, and DKK. *Hegemoni (Negosiasi dan Konsensus Produk Budaya Indonesia)*. Samata: Alauddin University Press, 2021.
- Teguh, and Imam Safi'i. "Sejarah Menjamurnya Masjid dan Langgar Pasca-65 di Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung." *Kontemplasi* 6, no. 02 (2018): 291–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/kontem.2018.6.2.291-308>.
- Topan, A, and A Hakim. "The Role of Local Religious Figures (Kiai) in Strengthening Political Participation in Post-New Order Madura 1998-2019." *NAHNU: Journal of Nahdlatul*

*Ulama and ...* 1, no. 1 (2023): 21–39.  
<https://ojs.nupalengaan.or.id/NahNU/article/view/22%0Ahttps://ojs.nupalengaan.or.id/NAHNU/article/download/22/2>.

Topan, Ali. "Potret Kehidupan Umat Beragama (Studi Kasus Penolakan Wahabi-Salafi di Pamekasan Madura 2010-2023)." *ENTITA : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2024): 67–86.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v6i1.12589>.

— — —. "Respons Aliansi Ulama Madura ( AUMA ) Terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2022): 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kyai Dan Kekuasan*. Yogyakarta: PT LKis, 2004.

Wafa, M. Dhuha Aniquil. "Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009." *Journal of Indonesian History* 1, No. 1 (2012): 63–70.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/2227>.

Wijaksono, Agung, and Taufik Rizki Sista. "Kultur Pesantren: Backround Kyai, Output Santri, dan Marketable Pesantren." *Wijaksono, Agung Sista, Taufik Rizki* 1, no. 1 (2023).  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/9491>.

Yalvena, Miaz: *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. UNP Press, 2012.